

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SESTER GANJIL 2016/2017

Bersama ini kami laporkan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah kami lakukan dalam bentuk memberikan: Pendampingan Rencana Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Adapun hal-hal yang kami laporkan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kegiatan : Koordinasi, Konsolidasi, dan Konsultasi;

2. Pelaksanaan Kegiatan:

Kegiatan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2017

Tempat : Kel. Suka Maju, Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

Waktu : 14.00 Wib. s.d. 17.30 Wib.

3. Petugas Penyuluhan:

1) Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M.S.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

2) Nama : Hepiana Patmarina, S.E.,M.M.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

3) Nama : Ardansyah, S.E.,M.M.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

4) Nama : Khairudin, S.E.,M.S.,Ak.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

4. Peserta : Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK, Staf Kelurahan dan Kelompok Pengrajin Pembuat Emping Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

5. Berikut dilampirkan :

1) Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

2) Surat Keterangan dari Lurah Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung


3) Daftar hadir peserta kegiatan koordinasi, konsolidasi dan konsultasi, yang ditandatangani oleh Lurah Kel. Suka Maju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung

- 4) Materi Kegiatan Pendampingan Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, dalam bentuk kegiatan: Koordinasi, Konsolidasi dan Konsultasi.
- 5) Foto bukti pendampingan ke Pengrajin Pembuat Emping

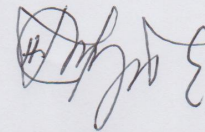
Demikian laporan kegiatan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 7 Februari 2017
Ketua Tim Pendampingan,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung



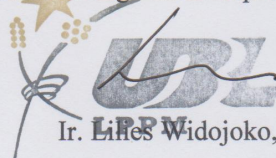
Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E.,M.A.Ec.



Dra. Sapmaya Wulan, M.S.

Mengesahkan:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UBL,



Ir. Lili Widojoko, M.T.



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "B" No: 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Lb. Ratu, Bandar Lampung. Telp. : 701979 – 701463. Fax. 701467

SURAT TUGAS	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	01/ST/FEB-UBL/I/2017
	Halaman	1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dibawah ini :

1. N a m a : Dra. Sapmaya Wulan, M.S.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.

2. N a m a : Hepiana Patmarina, S.E., M.M.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.

3. N a m a : Ardansyah, S.E., M.M.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.

4. N a m a : Khairudin, S.E., M.S.Ak.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.


Untuk melaksanakan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa Pendampingan Rencana Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2017
Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur
Kota Bandar Lampung

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 23 Januari 2017

D e k a n,


Dr. Andala Karim Purnama Barusman, S.E., M.A.Ec.



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
KELURAHAN SUKAMAJU**

Jalan Laks. RE. Martadinata Sukamaju No. 30 Kota Bandar Lampung Kode Pos 35236

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100 / 07 / VI. 139 / I / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : Dra. Sapmaya Wulan, M.S.
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
2. Nama : Hepiana Patmarina, SE., MM
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
3. Nama : Ardansyah, SE.,MM
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung
4. Nama : Khairudin, SE., M.S., Ak.
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Telah melakukan Pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan perencanaan Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung, dalam bentuk Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi dan Konsultasi. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada :

- Hari / Tanggal : Jum'at / 27 Januari 2017
Waktu : Pukul 14.00 – 17.30 WIB
Tempat : Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Telukbetung Timur
Kota Bandar Lampung

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 31 Januari 2017



LURAH SUKAMAJU
Hi. S A B I H A . A S . B A
NIP. 19611028 198101 2 001



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Rartu, Bandar Lampung Telp: 701979

SURAT KETERANGAN

No: 208 / LPPM / II / 2017

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama : Dra. Sapmaya Wulan.,M.S
b. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UBL (Ketua Tim)
c. NIDN : 0024085701
2. a. Nama : Ardansyah S.E.,M.M
b. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UBL (Anggota Tim)
c. NIDN : 0228026501
3. a. Nama : Hepiana Patmarina.,S.E.,M.M
b. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UBL (Anggota Tim)
c. NIDN : 0211016601
4. a. Nama : Khairudin.,S.E.,M.S.,Ak
b. Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UBL (Anggota Tim)
c. NIDN : 0206097505

Telah melaksanakan tugas pengabdian dengan judul : **“Pendampingan Perencanaan Pendirian Koperasi Bagi Kelompok Industri Rumah Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Sukamaju Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dalam Bentuk Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi Dan Konsultasi.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 02 Februari 2017

Ketua LPPM-UBL

UBL
LPPM
Ir. Lilis Widojoko, M.T

Tembusan:

1. Bapak Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**DAFTAR HADIR PENGABDIAN MASYARAKAT
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENDIRIAN KOPERASI BAGI KELOMPOK
INDUSTRI RUMAH TANGGA PENGRAJIN EMPING DI KELURAHAN SUKA
MAJU KEC. TELUK BETUNG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG**

Tempat : Desa Suka Maju

Hari/Tanggal : Jumat 27 Januari 2017

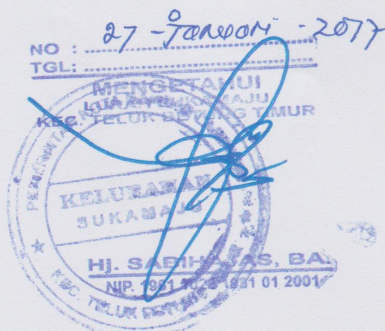
Waktu : 14:00 s/d

No	Nama	Pekerjaan	Tanda Tangan
1	Hj. Sabiha, As. BA.	D. Sukameji	
2	Nurhasanah	Ka. TP. Plek	
3	Rohimah	Kpua Klompok	
4	Dessy Putri Sari	Staf Kelurahan	
5	JANU LIANU	Staf Kelurahan	
6	Hudari YANIONI	"	
7	ASIAH	pengrajin	
8	Sadriab	anggota	
9	Siti AMINAH	pengrajin	
10	HASANAH	pengrajin	
11	MASITAH	pengrajin	
12	HAMDAN	pengrajin	
13			
14			
15			

Bandar Lampung 27 Januari 2017

Ketua Tim

Dra. Sapmaya Wulan, M.S.



PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI

Disampaikan pada:

**Kegiatan Pendampingan Pendirian Koperasi bagi Kelompok Industri Rumah
Tangga Pengrajin Emping di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Teluk Betung
Timur Kota Bandar Lampung, dalam bentuk kegiatan: Koordinasi, Konsolidasi
dan Konsultasi.**

Kegiatan Dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 27 Januari 2017
Waktu : Pukul 14.00 – 17.30 Wib.
**Tempat : Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur
Kota Bandar Lampung**



Tim Pengabdian:

Ketua: Dra. Sapmaya Wulan, MS.
Anggota 1: Hepiana Patmarina, SE.,MM.
Anggota 2: Ardansyah, SE,MM.
Anggota 3: Khairudin, SE.,MS.Ak.

Bandar Lampung
Januari 2017

I. PENDAHULUAN

Suatu koperasi hanya dapat didirikan bila memenuhi persyaratan dalam mendirikan koperasi. Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah Warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan hukum;
- c. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota
- d. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
- e. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Selain persyaratan diatas, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang dikemukakan oleh Suarny Amran et.al (2000:62) antara lain sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya keje-lasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
- b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
- c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi

dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

- d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-ngelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/ dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan

Setelah persyaratan terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, setelah memiliki bekal yang cukup dan telah siap para pendiri melakukan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri dinas koperasi dan pejabat lainnya, pendirian koperasi tidak sampai disana karena lembaga koperasi yang telah didirikan perlu disahkan badan hukumnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan tersebut diuraikan di bawah ini :

II. TAHAP-TAHAP PENDIRIAN KOPERASI

A. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi

Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :

- a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.
- b. Mempersiapkan acara rapat.
- c. Mempersiapkan tempat acara.
- d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.

B. Tahap rapat pembentukan koperasi

Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. Rapat

pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai syarat sahnya pembentukan koperasi primer. Selain itu, pejabat desa dan pejabat Dinas Koperasi dan UKM dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi, dapat dirinci sebagai berikut:

Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi, yaitu surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan koperasi.

Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. Konsep Anggaran Dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. Anggaran Dasar biasanya mengemukakan :

Nama dan tempat kedudukan, maksudnya dalam Anggaran Dasar tersebut dicantumkan nama koperasi yang akan dibentuk dan lokasi atau wilayah kerja koperasi tersebut berada.

Landasan, asas dan prinsip koperasi, di dalam Anggaran Dasar dikemukakan landasan, asas dan prinsip koperasi yang akan dianut oleh koperasi.

Maksud dan tujuan, yaitu pernyataan misi, visi serta sasaran pembentukan koperasi.

Kegiatan usaha, merupakan pernyataan jenis koperasi dan usaha yang akan dilaksanakan koperasi. Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Misalnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan koperasi jasa atau koperasi serba usaha.

Keanggotaan, yaitu aturan-aturan yang menyangkut urusan keanggotaan koperasi. Urusan keanggotaan ini dapat ditentukan sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan dibentuknya. Biasanya ketentuan mengenai keanggotaan membahas persyaratan dan prosedur menjadi anggota koperasi, kewajiban dan hak-hak dari anggota serta

ketentuan-ketentuan dalam mengakhiri status keanggotaan pada koperasi. **Perangkat koperasi**, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada organisasi koperasi. Perangkat koperasi tersebut, sebagai berikut :

- Rapat Anggota. Dalam Anggaran Dasar dibahas mengenai kedudukan rapat anggota di dalam koperasi, penetapan waktu pelaksanaan rapat anggota, hal-hal yang dapat dibahas dalam rapat anggota, agenda acara rapat anggota tahunan, dan syarat sahnya pelaksanaan rapat anggota koperasi.
- Pengurus. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengurus dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengurus, tugas, kewajiban serta wewenang dari pengurus koperasi.
- Pengawas. Dalam Anggaran Dasar dijabarkan tentang kedudukan pengawas dalam koperasi, persyaratan dan masa jabatan pengawas, tugas serta wewenang dari pengawas koperasi.
- Selain dari ketiga perangkat tersebut dapat ditambahkan pula pembina atau badan penasehat.

Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi, yaitu pembahasan mengenai jenis modal yang dimiliki (modal sendiri dan modal pinjaman), ketentuan mengenai jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota.

Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yaitu ketentuan yang membahas penjelasan mengenai SHU serta peruntukan SHU koperasi yang didapat.

Pembubaran dan penyelesaian, membahas tata-cara pembubaran koperasi dan penyelesaian masalah koperasi setelah dilakukan pembubaran. Biasanya penjelasan yang lebih rinci mengenai hal ini dikemukakan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau aturan lainnya.

Sanksi-sanksi, merupakan ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada anggota, pengurus dan pengawas koperasi, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Anggaran Dasar atau aturan lain-nya yang telah ditetapkan.

Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus, yaitu ketentuan-ketentuan pelaksana dalam Anggaran Dasar yang sebelumnya dimuat dalam Anggaran Dasar.

III. PENUTUP

Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut :

- a. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan melampirkan :
 1. Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap dua, aslinya bermaterai)
 2. Berita acara rapat pendirian koperasi.
 3. Surat undangan rapat pembentukan koperasi
 4. Daftar hadir rapat.
 5. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.
 6. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP dilengkapi riwayat hidup).
 7. Rencana awal kegiatan usaha koperasi.
 8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, hibah.
 9. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder yang berupa deposito pada bank pemerintah.
 10. Mengisi formulir isian data koperasi.
 11. Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.
- b. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- c. Apabila permintaan pengesahan akta pendirian koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan bukti penerimaan.

- d. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan pengesahan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran dasar koperasi.
- 1) tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan
 - 2) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- e. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) minggu.
- f. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaannya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran tentang tanda pengesahan oleh Pejabat a.n Menteri.
- g. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia
- h. Buku Daftar Umum serta Akte-Akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan untuk hal di atas adalah Rp. 25.000
- i. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- j. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- k. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :

Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah koperasi itu berada (dalam hal ini berkedudukan di Kabupaten Bandung), serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi dan UKM RI.

Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani akta tersebut. **Kemudian akta pendirian koperasi** yang telah dibuat notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi>

<http://kickydut.wordpress.com/2010/11/14/jenis-jenis-koperasi-yang-ada-di-indonesia>

<http://www.scribd.com/doc/21276977/Peran-Koperasi-Dalam-Ekonomi-Kerakyatan>

<http://www.anneahira.com/artikel-umum/koperasi.htm>

<http://yudhacandra.ngeblogs.com/2009/11/15/makalah-tentang-koperasi/>

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_2807/title_keunggulan-dan-kelemahan-koperasi/



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR

KANTOR:
KELURAHAN SUKAMAJU
JL. LAKS. RE. MARTADINATA
BANDAR LAMPUNG



PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
KELURAHAN SUKAMAJU
KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR
BANDAR LAMPUNG





